

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Gorontalo

Role of the Regional Disaster Management Agency in Addressing Flood Disasters in Gorontalo City

Abdul Jalal S. Saleh^{1*)}, Funco Tanipu¹⁾, Rudy Harold¹⁾

¹Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: abduljalalsaleh242@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Barat khususnya pada masyarakat Kelurahan Molosipat W. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih terdapat kurangnya peran terhadap masyarakat dalam bentuk penanggulangan yang telah di atur dalam RENSTRA pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2007 yaitu langkah penanggulangan bencana yang di karenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih kekurangan dengan fasilitasi penanggulangan kebencanaan dan sumber daya manusia yang ada pada instansi tersebut. Maka dari itu penanggulangan kebencanaan tidak berjalan optimal pada masyarakat.

Kata Kunci: peran BPBD, struktur sosial, prespektif masyarakat

Abstract

This study aims to analyze the role of BPBD (Regional Disaster Management Agency) in overcoming flood disasters in Gorontalo City, West Kota District, especially in the Molosipat W Village community. This study was conducted through an approach using descriptive qualitative methods with interview, observation and documentation techniques. The results of the study indicate that the main tasks and functions of the Regional Disaster Management Agency are not running well. in this case the Regional Disaster Management Agency still has a lack of role towards the community in the form of mitigation that has been regulated in RENSTRA article 21 of Law Number 24 of 2007, namely disaster management steps because the Regional Disaster Management Agency is still lacking in disaster management facilities and human resources in the agency. Therefore, disaster management does not run optimally in the community.

Keywords: role of BPBD, social structure, community perspective

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hujan merupakan komponen penting dalam keseimbangan energi dan siklus hidrologi, serta berperan signifikan dalam pembentukan cuaca regional dan iklim global. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik curah hujan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kondisi topografi, dinamika atmosfer, serta faktor lingkungan lainnya pada lokasi terjadinya hujan. Perbedaan curah hujan antarwilayah ditentukan oleh intensitas dan durasi hujan di masing-masing daerah (Saputra et al., 2021).

Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba dengan durasi genangan yang singkat, namun dalam beberapa kasus juga berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan genangan yang berkepanjangan. Banjir

umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, luapan sungai, tersumbatnya saluran drainase, atau keruntuhan bendungan. Suatu peristiwa banjir dikategorikan sebagai bencana apabila telah mengganggu aktivitas kehidupan manusia dan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Penanganan risiko banjir dapat dilakukan melalui pendekatan struktural maupun nonstruktural. Secara konseptual, banjir dapat didefinisikan sebagai: (1) kondisi ketika aliran sungai melampaui muka air normal sehingga meluap dari palung sungai dan menyebabkan genangan pada lahan rendah di sekitarnya, termasuk permukiman; dan (2) gelombang banjir yang bergerak ke arah hilir sistem sungai dan berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai (Udori & Miranti, 2019).

Selain bencana alam, Indonesia juga memiliki potensi terjadinya bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Bencana ini merupakan salah satu bentuk risiko dari berbagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan, seperti kebakaran hutan, penebangan hutan secara ilegal, serta bencana industri (Rahmania, 2021).

Frekuensi kejadian banjir yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana yang penanganannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif. Penanggulangan banjir tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Apabila penyelesaian masalah banjir hanya bergantung pada pemerintah, maka upaya penanganannya akan menghadapi berbagai keterbatasan dan sulit untuk diselesaikan secara berkelanjutan tanpa partisipasi aktif masyarakat (Pratama et al., 2022).

Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri atas berbagai institusi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, peran dan intervensi pemerintah sangat diperlukan, khususnya dalam upaya relokasi wilayah terdampak banjir serta proses evakuasi masyarakat yang terdampak bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya dipahami sebatas kegiatan evakuasi dan analisis pascabencana, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi, baik dalam tahap pra-bencana maupun pascabencana, menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana (Sumiati & Arifin, 2024).

Salah satu wilayah dengan intensitas curah hujan yang tinggi berada di Pulau Sulawesi, khususnya Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo tercatat memiliki curah hujan sebesar 354 mm pada tahun 2024 dengan sifat hujan berada pada kategori Atas Normal (AN) berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (Buletin Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah, 2023). Banjir melanda enam kecamatan di Kota Gorontalo, yaitu Kecamatan Kota Selatan, Kota Tengah, Dungingi, Kota Barat, Dumbo Raya, dan Kota Timur. Dampak banjir bandang yang mencapai sekitar 80 persen wilayah terdampak menyebabkan terjadinya kelumpuhan aktivitas perekonomian. Kelompok yang paling merasakan dampak dari bencana ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas informal di ruang publik (Yefta Christophereus Asia Sanjaya, 2024).

1. Pendapatan perekonomian daerah yang melemah
2. Aktifitas Masyarakat terganggu, dan
3. Kerugian material pada pemukiman warga

Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sistem penanggulangan bencana serta memperkuat pemahaman mitigasi bencana di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai di Kota Gorontalo. Secara khusus, masyarakat Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, masih memerlukan keterbukaan

informasi kebencanaan dan sosialisasi mitigasi bencana yang berkelanjutan dari BPBD guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana hingga pada tahap mitigasi.

Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian oleh Permana (2023) yang mengkaji optimalisasi peran BPBD Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, sistem peringatan dini, serta koordinasi antarlembaga. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada peran aparatur BPBD tanpa melibatkan masyarakat secara langsung sebagai objek kajian. Berbeda dengan penelitian ini, kajian yang dilakukan menempatkan BPBD dan masyarakat Kota Gorontalo sebagai subjek utama penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Selanjutnya, penelitian oleh Fariza dan Handayani (2022) membahas tindakan mitigasi bencana struktural yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Penelitian tersebut menelaah kebijakan mitigasi bencana pada tataran makro melalui metode studi pustaka, sehingga lebih menekankan aspek regulasi, kerangka kebijakan, dan mitigasi struktural. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi pustaka, sedangkan penelitian ini memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan, sehingga menghasilkan data empiris yang lebih aktual dan kontekstual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang dilakukan di Kota Gorontalo, khususnya di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, yang memiliki karakteristik sosial budaya serta kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis kinerja struktural BPBD, tetapi juga mengungkap adanya disfungsi sosial dalam sistem penanggulangan bencana banjir melalui perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons (AGIL). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis empiris mengenai sinergi dan kendala antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam penanggulangan banjir, sekaligus memperkaya khazanah literatur sosiologi kebencanaan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bencana banjir di Indonesia yang disebabkan oleh ketidaksinambungan peran dan fungsi sistem sosial yang ada. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Selain itu, artikel ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian terkait penyebab utama terjadinya bencana banjir di wilayah Indonesia, keterkaitan antara kondisi lingkungan dan bencana banjir, serta disfungsi peran dan sistem sosial dalam masyarakat yang menyebabkan bencana banjir terus berulang (Pratama et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang terdapat dalam kehidupan nyata (alamiah) dengan tujuan untuk menginvestigasi dan memahami suatu fenomena, meliputi apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana proses terjadinya (Chariri, 2009). Pendekatan ini menekankan pada proses eksploratif (*going exploring*) yang melibatkan kajian mendalam (*in-depth study*) dan berorientasi pada studi kasus, baik kasus tunggal maupun sejumlah kasus.

Sejalan dengan pendapat Denzin dan Lincoln (1994), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, serta dilaksanakan dengan melibatkan berbagai metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif berupaya menemukan dan menggambarkan secara naratif aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian serta dampak dari tindakan tersebut terhadap kehidupan mereka (Fadli, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan berlokasi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat,

Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Lokasi tersebut dipilih karena berada di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai yang kerap meluap dan berpotensi menimbulkan bencana banjir. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan aparat kelurahan, pegawai BPBD, serta masyarakat Kelurahan Molosipat W. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, serta informasi relevan yang bersumber dari media online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BPBD Kota Gorontalo secara resmi dibentuk pada tahun 2009 sebagai respons atas terjadinya bencana banjir besar yang melanda Kota Gorontalo pada periode 2007–2008. Peristiwa tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem kelembagaan yang secara khusus menangani penanggulangan bencana secara terencana dan terkoordinasi.

Sebagai organisasi perangkat daerah, BPBD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang mencakup koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana (BPBD Kota Gorontalo, 2025).

Langkah koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Gorontalo melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Kepolisian, serta unsur perangkat daerah lainnya. Seluruh pihak yang terlibat dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana yang terjadi. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Pos Komando (Posko) sebagai pusat kendali dan pengambilan keputusan, sehingga seluruh unsur yang terlibat dapat bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya penanganan bencana.

“...Kalau ada bencana pasti akan kami koordinasi dengan dinas atau instansi terkait sebagaimana yang kami perlukan karena kami tidak mampu untuk mengerjakan sendiri malahan koordinasi itu kalau pada saat tanggap darurat kita tuangkan dalam SK pos komando yang menyatukan semua instansi untuk mencapai satu tujuan...”. (Wawancara bapak HT, 18 Juni 2025, 09, 17 WITA sekretaris BPBD)

Dalam menjalankan fungsi komando, BPBD pada saat fase tanggap darurat melakukan penunjukan Ketua Komandan Posko. Jabatan tersebut umumnya diemban oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengoordinasikan serta menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Melalui mekanisme ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara efektif dan terpusat.

Sementara itu, fungsi pelaksana dalam lingkup BPBD diwujudkan melalui pelaksanaan tugas penanggulangan bencana pada berbagai fase, yaitu fase peringatan dini, fase tanggap darurat, serta fase rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Pelaksanaan fungsi tersebut disesuaikan dengan struktur organisasi BPBD yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peran dan fungsi BPBD Kota Gorontalo dalam penanganan kebencanaan dijalankan melalui tiga bidang teknis utama. Pertama, bidang pencegahan (pra-bencana), yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan berbagai program guna mengurangi potensi bahaya serta tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana. Kedua, bidang kedaruratan, yang bertugas

melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, penyusunan rencana kontinjensi, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi potensi bencana. Ketiga, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yang berperan memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, dengan pendekatan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam menunjang kinerjanya, BPBD Kota Gorontalo juga dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana kebencanaan. Peralatan tersebut meliputi peta kebencanaan serta sistem peringatan dini (Early Warning System / EWS) elektronik yang berfungsi menyampaikan informasi potensi bencana dalam bentuk alarm atau sirene. Namun demikian, hingga saat ini EWS tersebut hanya tersedia di Kelurahan Bugis. Selain itu, BPBD Kota Gorontalo memiliki tiga unit perahu karet dan dua mesin tempel yang digunakan dalam proses evakuasi korban banjir.

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menjadi kendala serius dalam pelaksanaan tugas BPBD, khususnya pada saat kondisi bencana tidak memungkinkan dan terjadi secara bersamaan di beberapa wilayah. Pada peristiwa banjir tahun 2024, BPBD Kota Gorontalo mengalami keterbatasan armada evakuasi, terutama perahu karet, sehingga menyulitkan proses evakuasi korban apabila seluruh kelurahan terdampak banjir secara serentak.

Minimnya jumlah alat bantu kebencanaan yang dimiliki BPBD secara signifikan membatasi ruang gerak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, Bapak D.I., peningkatan informasi kebencanaan kepada masyarakat dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah menara Early Warning System elektronik yang hingga saat ini hanya tersedia satu unit di Kota Gorontalo. Idealnya, kota ini memiliki beberapa menara EWS yang tersebar di titik-titik wilayah rawan banjir, khususnya di kawasan yang rentan terhadap luapan air dari Danau Limboto, Sungai Bone, dan Sungai Bulango.

Kondisi tersebut menjadi semakin krusial mengingat Kota Gorontalo merupakan wilayah yang dilalui aliran air dari satu danau dan dua sungai besar yang kerap meluap. Kerentanan wilayah ini telah dipetakan oleh BPBD Kota Gorontalo dan dijadikan sebagai acuan evaluasi daerah rawan banjir, sebagaimana ditunjukkan dalam peta kebencanaan yang digunakan oleh BPBD.

“...kenapa saya sampaikan kita kurang menara Elektronik Worning Sistem karena sabagian wilaya yang ada di Kota Gorontalo masih belum bisa di jangkau terhadap informasi peringatan dini yang akan terjadi banjir contohnya Kota Barat air yang dari danau limboto pintu masuknya berdekatan langsung dengan Kelurahan Molosipat W...”. (Wawancara bapak DI, 23 Juni 2025, 09.30 WITA Pranata Bencana).

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 BPBD Kota Gorontalo mengalami kekurangan sarana dan prasarana evakuasi yang memadai untuk mendukung proses penyelamatan masyarakat terdampak banjir. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi instansi ini dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat. Pasca kejadian banjir tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan berupa tambahan armada evakuasi. Bantuan tersebut membantu memperkuat kapasitas BPBD Kota Gorontalo melalui penyediaan dua unit perahu karet dan dua unit mesin tempel.

Rekognisi Sosial Masyarakat Pada BPBD

Rekognisi sosial masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merujuk pada sejauh mana masyarakat mengenal, memahami, serta mengakui peran dan fungsi BPBD dalam penanganan bencana di wilayah mereka. Dalam konteks ini, masyarakat merupakan subjek utama yang harus dipastikan memperoleh penanganan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana pada dasarnya merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana guna melindungi keselamatan, kesehatan, serta keberlangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan data yang tercatat di BPBD, terdapat delapan kelurahan dengan tingkat kerugian yang berbeda-beda. Salah satu wilayah terdampak berada di Kecamatan Kota Barat, dengan jumlah rumah terdampak tercatat sebanyak 1.362 unit (seribu tiga ratus enam puluh dua rumah). Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan, Bapak A.D. (62 tahun), yang menyatakan bahwa banjir di Kelurahan Molosipat W memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat dihadapkan pada berbagai kerugian, baik material maupun nonmaterial. Dalam wawancara, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“...banjir yang ada pada tahun 2024 kemarin sangat mengganggu aktivitas kami selaku masyarakat apalagi yang berada di kelurahan molosipat W peralatan rumah tangga dan dinding rumah yang kena air banjir ba kase tinggal bekas pece...”. (Wawancara Bapak AD, masyarakat 24 Juni 2025, 19.24 WITA)

Merujuk pada penjelasan informan, banjir yang melanda permukiman masyarakat menimbulkan dampak kerugian, baik material maupun nonmaterial. Dampak nonmaterial terutama terlihat pada terbatasnya aktivitas keseharian akibat genangan banjir, yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dampak tersebut dirasakan oleh berbagai lapisan, mulai dari aparat pemerintah, petani, hingga pelaku ekonomi informal yang sehari-hari berjualan di pinggir jalan di Kelurahan Molosipat W.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada saat kejadian banjir dilaporkan lebih banyak berupa penyediaan perahu karet untuk evakuasi korban, yang diprioritaskan bagi kelompok rentan, khususnya lansia. Namun, keterbatasan jumlah armada evakuasi menyebabkan bantuan tersebut tidak selalu dapat menjangkau seluruh kelurahan terdampak. Selain itu, bantuan logistik berupa bahan makanan pokok maupun makanan siap saji dilaporkan belum tersalurkan secara merata kepada korban banjir, termasuk warga yang rumahnya terendam.

Pada konteks ini, dapat dilihat bahwa BPBD semestinya mampu menyalurkan bantuan hingga ke titik-titik lokasi yang masih ditempati masyarakat melalui perencanaan penanggulangan bencana yang dimiliki. Hal ini penting mengingat banyak warga tetap bertahan di rumah untuk menyelamatkan serta menjaga harta benda agar tidak terbawa arus banjir. Situasi tersebut menuntut masyarakat untuk beradaptasi terhadap kondisi darurat yang terjadi.

Kondisi di atas dapat dijelaskan melalui teori struktural fungsional Talcott Parsons, khususnya konsep AGIL pada unsur *Adaptation* (Adaptasi), yaitu kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal. Adaptasi mencakup kemampuan memperoleh sumber daya yang diperlukan serta menghadapi tantangan yang muncul dari lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut:

“...dorang BPBD tidak perna b salurkan bantuan makanan sampe di tiktik banjir hanya sampe di posko sedangkan torang harus mo mengamankan torang pe harta benda dan yang baku tolong ba angka barang dorang masyarakat di sini yahh bo torang torang orang sini pake kayu (rakit) karna perahu karet yang di miliki oleh BPBD tidak masuk sampai di kelurahan molosipat W...” (Wawancara masyarakat MR, 26 Juni 2025, 19.32 WITA).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas menyatakan bahwa sosialisasi kebencanaan merupakan bagian dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi risiko bencana serta cara-cara yang tepat dalam menghadapinya. Dengan demikian, sosialisasi kebencanaan dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terkait kebencanaan, sehingga masyarakat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi situasi darurat.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan, yaitu Ibu D.H. (39 tahun). Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“sosialisasi bencana yang macam kau tanya itu belum pernah ada di sini tidak tau kalo dengan kelurahan lain adapun kalo di laksanakan di kelurahan Molosipat W pasca banjir pasti kitorang masyarakat akan di kumpulkan paling tidak ada informasi dari tetangga-tetangga yang ba kase tau kalo ada sosialisasi dari BPBD”. (Wawancara masyarakat DH, 27 Juni 2025, 17.00 WITA).

Sejalan dengan uraian di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, yaitu Ketua RT/RW, yang memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan pada level masyarakat. Wawancara ini dilakukan sebagai langkah triangulasi untuk memeriksa akurasi informasi yang telah disampaikan oleh informan dari kalangan masyarakat maupun unsur pemerintah di tingkat kelurahan.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Ketua RT I/RW II, yaitu H.N. (25 tahun). Informan tersebut membenarkan keterangan informan sebelumnya terkait masih kurang optimalnya pelaksanaan evakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada saat kejadian banjir. Dalam wawancara, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Dorongan peba evakuasi masyarakat itu saya pikir masih kurang sekali, bahkan dorongan perahu karet tidak masuk ke Molosipat cuma sebentar sampe di dungi bahkan saya ada ba evakuasi lansia saya ada pikul karna keterbatasan perahu karet dan Selama saya menjabat sebagai ketua RT/RW saya tidak pernah mendapatkan informasi terkait sosialisasi kebencanaan dari BPBD”. (Wawancara ketua RT/RW HN, 30 Juli 2025, 09.12 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga yang terdampak banjir tahun 2024, ditemukan adanya perbedaan keterangan antara masyarakat dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian perspektif mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menganalisis temuan tersebut dengan menggunakan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.

Dalam perspektif struktural fungsional, realitas sosial dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam menjaga keseimbangan sosial. Ketika salah satu bagian atau struktur dalam sistem sosial mengalami perubahan atau tidak berfungsi secara optimal, maka kondisi tersebut dapat memengaruhi bagian sistem lainnya. Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa setiap elemen dalam masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi satu sama lain.

Verifikasi Data Wawancara

Dengan mempertimbangkan hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat dan Ketua RT/RW di Kelurahan Molosipat W, peneliti melakukan langkah verifikasi untuk memvalidasi temuan wawancara. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari masyarakat dan Ketua RT/RW yang terlibat langsung di lapangan dengan keterangan dari pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kepala Kelurahan, serta instansi yang diteliti, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada wawancara tersebut, Kepala Kelurahan mengakui bahwa banjir terjadi akibat meluapnya air sungai yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Molosipat W. Dampak banjir menyebabkan banyak aktivitas masyarakat terhenti. Selain itu, wilayah Molosipat W juga mengalami pemadaman listrik sebagai langkah untuk meminimalkan potensi bahaya lain yang dapat timbul. Lokasi terdampak paling parah berada pada permukiman warga yang berdekatan dengan area persawahan. Kepala Kelurahan juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa titik permukiman warga yang sulit diakses, termasuk oleh perahu karet, sehingga menyulitkan proses evakuasi.

Sebagai langkah awal verifikasi, peneliti mewawancarai Kepala Kelurahan Molosipat W, yaitu Bapak R.P. (67 tahun). Dalam wawancara, beliau menyampaikan sebagai berikut.

“Kebetulan Letak Molosipat W. ini di pinggir sungai maka sangat rentan sekali ketika air itu meluap di permukiman warga dan sebagian adalah daerah persawahan yang bisa di katakan

datan rendah maka daerah tersebut yang paling lama air banjirnya surut. Salah satu contoh kantor kelurahan molosipat banjir itu sampe di pinggang orang dewasa jadi memang parah sakali susah untuk torang beraktifitas bahkan waktu banjir itu di daerah sini ada pemadaman selama 3 hari.” (Wawancara bersama kepala kelurahan Molosipat W, RP, 18 Juli 2025, 10.51 WITA).

Selanjutnya, peneliti melakukan validasi data hasil penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai instansi yang menangani dan melakukan upaya pencegahan kebencanaan bagi masyarakat Kota Gorontalo, khususnya di Kelurahan Molosipat W. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan wawancara untuk kedua kalinya dengan Sekretaris BPBD guna mengonfirmasi keterangan yang disampaikan oleh masyarakat dan Ketua RT/RW Kelurahan Molosipat W.

Pihak BPBD membenarkan bahwa alat evakuasi berupa perahu karet tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Kelurahan Molosipat W. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan sarana evakuasi yang dimiliki BPBD, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara kedua dengan Sekretaris BPBD berikut ini:

“Memang betul kemarin molosipat W. itu tidak dapat kita jangkau keseluruhan karena kami kemari pada saat bencana banjir di tahun 2024 perahu karet BPBD masih sangat terbatas dengan jumlah perahu karet 2 unit siap pakai dan 1 unit bocor dan kami paksa untuk di pakai jadi setiap beberapa menit kami isi ulang angin perahu keret tersebut, dan kalo untuk mesin kami hanya punya 2 unit mesin. Tapi alhamdulillah pada saat selesai bencana kami Di tambah perahu karet oleh BNPB 2 unit perahu karet dan 1 unit mesin.” (Wawancara bapak HT, 18 Juli 2025, 14.28 WITA sekretaris BPBD).

Keterbatasan sarana dan prasarana pada saat bencana banjir tahun 2024 menjadi kendala utama bagi BPBD dalam melaksanakan proses evakuasi, terlebih apabila beberapa kelurahan terdampak secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, BPBD menyampaikan bahwa proses evakuasi di lapangan juga kerap menghadapi hambatan sosial, salah satunya ketika masyarakat meminta agar keluarganya diprioritaskan untuk dievakuasi terlebih dahulu. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris BPBD sebagai berikut:

“Kalo misalnya torang mo ka molosipat, sedangkan masi di biawu torang masyarakat so dola “ehh pak jangan dulu di sana torang dulu di sini ada torang pe keluarga di dalam” dan tidak mungkin torang BPBD untuk mo menolak, dan torang juga kekurangan personil kalo mo di hitung tim yang di lapangan itu hanya 17 orang kadang saya pun merangkap untuk turun langsung pada saat bencan begitupun yang lain”. (Wawancara bapak HT, 18 Juli 2025, 14.39 WITA sekretaris BPBD).

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki BPBD tersebut turut membentuk penilaian (rekognisi) masyarakat terhadap kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana. Apabila dianalisis melalui perspektif sosiologi, khususnya konsep AGIL dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons, dapat dipahami bahwa suatu sistem sosial memerlukan empat imperatif fungsional agar dapat berjalan secara stabil, yaitu Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (pemeliharaan pola), yang dikenal dengan istilah AGIL (Rahmawati, 2020).

Adaptation (Adaptasi)

BPBD berupaya beradaptasi dengan keterbatasan sarana evakuasi pada situasi bencana agar tetap mampu menjalankan fungsi kelembagaan dan mempertahankan keberlangsungan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat.

Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

BPBD berusaha mencapai tujuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya, terutama dalam memastikan keselamatan masyarakat melalui pelaksanaan evakuasi serta koordinasi tanggap darurat.

Integration (Integrasi)

BPBD telah membangun koordinasi dengan beberapa instansi dan lembaga lain yang dituangkan melalui mekanisme pos komando. Namun, integrasi dengan masyarakat belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pengaturan prioritas evakuasi dan komunikasi di lapangan, sehingga berdampak pada efektivitas proses evakuasi serta ketepatan sasaran upaya pencegahan kebencanaan.

Latency (Pemeliharaan Pola)

Meskipun menghadapi perubahan situasi dan ketidakpastian dalam kondisi darurat, BPBD tetap berupaya mengoptimalkan kinerja berdasarkan fungsi dan tanggung jawab kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat indikasi disfungsi dalam sistem sosial, yaitu adanya gangguan pada fungsi yang seharusnya berjalan sebagaimana mestinya dalam suatu sistem. Disfungsi ini menunjukkan bahwa terdapat elemen sistem yang belum berfungsi secara optimal atau belum berjalan sesuai harapan, sehingga memengaruhi efektivitas penanggulangan bencana di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada masyarakat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integritas BPBD pada masyarakat

Berdasarkan kondisi pada saat bencana, dapat disimpulkan bahwa BPBD belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan perannya dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana secara optimal kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah personel serta minimnya armada evakuasi menjadi kendala utama yang menghambat kemampuan BPBD dalam merespons bencana secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas BPBD dalam menangani situasi darurat.

2. Peran Dan Fungsi BPBD

Meskipun menghadapi keterbatasan, baik dari sisi armada evakuasi maupun jumlah personel, BPBD tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana di Kota Gorontalo. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penambahan sarana evakuasi merupakan kebutuhan yang mendesak guna memastikan layanan penanggulangan bencana yang lebih profesional, tanggap, dan dapat dipercaya di masa mendatang.

Berdasarkan dua poin tersebut, BPBD Kota Gorontalo perlu melakukan evaluasi dan peningkatan dalam penanganan bencana, terutama dalam mengoptimalkan hubungan sosial dan komunikasi dengan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan sosialisasi kebencanaan, pemanfaatan sumber daya manusia di tingkat lokal, serta peningkatan kolaborasi dengan aparat kelurahan/RT/RW. Selain itu, penambahan personel dan armada evakuasi perlu diprioritaskan guna mendukung efektivitas respons dan proses evakuasi saat bencana terjadi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo atas bantuan, dukungan, dan kesempatan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Kehadiran serta kontribusi instansi tersebut sangat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian, khususnya dalam penyediaan informasi dan akses data yang diperlukan.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Molosipat W atas kerja sama dan keterbukaan informasi yang diberikan. Masyarakat telah menyambut dengan baik dan bersedia menjadi narasumber dalam proses pengumpulan data lapangan. Wawancara dan observasi dapat terlaksana dengan lancar berkat dukungan masyarakat, sehingga peneliti sangat menghargai waktu dan partisipasi yang telah diberikan selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Teori Fungsionalisme oleh Emile Durkheim*. July, 1–23.
- BPBD KotaGorontalo. (2025). *HASIL ASISTENSI RENSTRA PD TAHUN 2025-2026*.
- Buletin Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Wilayah*. (2023). *VOLUME 01*,(September).
<https://doi.org/10.3451/buletinmkg.v3i5>
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/doi:10.21831/hum.v21i1.38075.33-54>
- Pratama, D. N., Amanda, R. B., & Anitasyah, S. (2022). Kajian Struktural Fungsional: Fenomena Banjir sebagai Akibat dari Tidak Selarasnya Fungsi dan Sistem di Indonesia. *Sosietas*, 12(1), 65–74. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48072>
- Rahmaniah. (2021). Analisis Penyebab Bencana Alam Banjir yang Ada di Wilayah Indonesia. *Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 1–10. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/gmpn4>
- Saputra, F. I., Zakaria, A., Arifaini, N., & Perangin Angin, G. (2021). Perbandingan Intensitas Curah Hujan Menggunakan Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Satelit Tropical Rainfall Measuring Missions (TRMM) di West Java. *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Desain (JRSDD)*, 9(4), 715–728. <https://doi.org/10.23960/jrsdd.v9i4.2097>
- Sumiati, I., & Arifin, R. K. (2024). Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 132–140. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i2.1208>
- Udori, A., & Miranti, M. (2019). Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i2.8>
- yeftha christophereus asia sanjaya. (2024). *Banjir Bandang Gorontalo: Belasan Ribu Warga Terdampak, 6 Kecamatan Terendam* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Banjir Bandang Gorontalo: Belasan Ribu Warga Terdampak, 6 Kecamatan Terendam”, Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/r.Kompas.Com>.